

KLIPING KORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Lampung Post Tribun Lampung Halaman 10
 Radar Lampung _____

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
											<input checked="" type="checkbox"/>		

Baru 717 Aset Pemkab Lamtim yang Bersertifikat

Untuk bidang tanah aset Pemkab Lamtim untuk pembangunan jalan dan irigasi, pihaknya tetap akan mengurus penyertifikatannya.

DJONI HARTAWAN JAYA

ASSET Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang sudah memiliki sertifikat baru 717 dari 1.698 bidang tanah. Pengajuan proses pengurusan sisanya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat secara bertahap.

Penyertifikatan tanah milik Pemkab tersebut untuk pengamanan aset dalam mengantisipasi dan menghindari terjadinya hal-hal yang tak diinginkan pada kemudian hari.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Lamtim Mansyur Sayah menjelaskan hingga akhir Oktober 2021 aset tanah milik Pemkab Lamtim tersebut tersebar di seluruh wilayah kabupaten tersebut. Pihaknya juga secara kontinu terus melakukan penertiban dan pengamanan.

Langkah penertiban merupakan pengamanan aset khususnya tanah sebagai bukti dokumen kepemilikan atau sertifikat.

"Jadi untuk penertiban secara kontinu sekaligus merupakan pengamanan aset tanah milik Pemkab tersebut. Pemkab

Lamtim melalui Kantor BPN melakukan penyertifikatan aset tanah tersebut," katanya, Senin (8/11).

Sebab, seiring dengan perkembangan pembangunan di Lamtim, ke depan tidak menutup



Jadi untuk penertiban secara kontinu sekaligus merupakan pengamanan aset tanah milik Pemkab tersebut.

kemungkinan atau bisa saja muncul klaim atas kepemilikan bidang tanah. Hal itu juga bisa saja terjadi atas bidang tanah aset milik Pemkab Lamtim.

KLIPING KORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Lampung Post Tribun Lampung Halaman 10
 Radar Lampung _____

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
											<input checked="" type="checkbox"/>		

Dia menjelaskan untuk bidang tanah aset Pemkab Lamtim untuk pembangunan jalan dan irigasi, pihaknya tetap akan mengurus untuk penyertifikatannya. Namun, hal itu belum dapat berjalan karena masih terbentur regulasi dari Kementerian BPN terkait pembatasan jumlah sertifikat peruas oleh batas administratif dan alam.

Bangunan dan Tanah

Sementara itu, Pemkab Pesisir Barat telah menyertifikatkan beberapa lokasi bangunan dan tanah yang menjadi aset pemerintah. Namun, ada sebagian dari aset pemerintah itu yang belum memiliki sertifikat.

Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) Pesisir Barat I Nyoman Setiawan, melalui Kabid Akutansi Aset, Unzir, mengatakan sampai saat ini dari 357 aset milik Pemkab baru 104 yang telah bersertifikat.

"Kendalanya banyak, ada dokumen belum lengkap, seperti surat pernyataan dari pengguna barang. Kami bukan yang mengurus sertifikat, tapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), jadi yang tahu masalahnya kenapa belum disertifikat ya di PRKP. Mereka yang melakukan penyertifikatan karena fungsi pertanahannya di mereka. Kami hanya administrasinya pencatatan data tanahnya di mana saja, seperti itu," katanya, kemarin.

Dia menyatakan aset yang sudah memiliki sertifikat, seperti lahan tanah di dekat Puskesmas Krui yang berada di jalur dua Bandara M Taufik Kiemas di Pekon Serai, Kecamatan Pesisir Tengah. Sementara aset aset yang belum bersertifikat, seperti sekolah milik pemerintah yang berada jauh dari lokasi pusat pemerintahan.

"Yang banyak belum bersertifikat seperti sekolah. Tetapi kalau bangunan perumahan untuk PNS seperti yang ada di Pekon Way Redak, Kecamatan Pesisir Tengah, walaupun baru pembangunan dalam beberapa tahun ini tetapi sudah memiliki sertifikat," ujarnya. (YON/DI)

djoni@lampungpost.co.id